



## Transformasi Wilayah Peri-Urban Kota Makassar

Ghinia Anastasia Muhtar<sup>1</sup>, Talha Dangkoa<sup>2</sup>, Irawan Matalapu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Mansoer Pateda, ghiniastraw@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Mansoer Pateda, tdangkua.1965@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Mansoer Pateda, irawanmatalapu7@gmail.com

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Peri-urban, Spatial, Makassar City

**Kata Kunci:** Peri-urban, Spasial, Kota Makassar

#### How to cite:

Muhtar, G. A., Dangkoa, T., & Matalapu, I. (2019). Transformasi Wilayah Peri-Urban Kota Makassar. *Journal of Humanity and Social Justice*, 1(2), 168-184

### ABSTRACT

*This paper examines the development of peri-urban in terms of physical and social aspects spatially in Makassar City, in 2006 and 2017. The research area covers 14 sub-districts. This research uses descriptive quantitative method using overlay analysis, weighting and spatial analysis. The results of this study indicate that over a span of 11 years (2006-2017) there has been a change in typology in several sub-districts which initially typed the EFA into PUP, namely in Manggala District, Biringkanaya District and Tamalanrea District, causing all sub-districts in Makassar City to be in the PUP category. These changes have a significant impact on the ancestral communities of Makassar City who have lived in Makassar before 2006 until 2018. These concrete impacts include high buildings which block the incoming sunlight for small ancestral homes and the increasing number of vehicles in road that causes congestion. The real impact is the homework for the Makassar City government to organize the city of Makassar for the ancestors, so that the ancestors still felt the originality of the city of Makassar from the past until the next generation.*

#### Abstrak

*Tulisan ini mengkaji mengenai perkembangan peri-urban (wilayah pinggiran kota) dari segi aspek fisik dan sosial secara spasial di Kota Makassar, pada tahun 2006 dan tahun 2017. Wilayah penelitian meliputi 14 kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis overlay, pembobotan dan spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama rentang 11 tahun (2006-2017) telah terjadi perubahan tipologi di beberapa kecamatan yang awalnya tipologi Peri-urban Sekunder (PUS) menjadi Peri-urban Primer (PUP) yaitu pada Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, sehingga menyebabkan semua kecamatan di Kota Makassar telah berada pada kategori PUP. Perubahan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Makassar yang telah tinggal di Makassar sebelum tahun 2006 sampai dengan 2018. Dampak nyata tersebut antara lain bangunan-bangunan yang tinggi sehingga menghalangi sinar matahari yang masuk kedalam rumah-rumah penduduk dan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan yang menyebabkan kemacetan. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Makassar untuk menata Kota Makassar, sehingga masyarakat leluhurlah Kota Makassar yang telah tinggal sangat lama di kota Makassar masih dapat merasakan adanya originalitas dari Kota Makassar sejak dahulu sampai generasi yang akan datang..*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan terhadap jumlah lahan yang digunakan. Namun demikian, lahan di wilayah perkotaan memiliki kapasitas yang terbatas. Akhirnya, wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan akan ikut perkembangan mengikuti gaya fisik kota (urban sprawl). Wilayah yang terpengaruh dengan perkembangan kota disebut peri-urban. Peri-urban area (PUA) adalah wilayah yang mengalami perubahan menuju sifat kekotaan atau zona transisi antara kota dan desa yang berdimensi multifungsi (Kurnianingsih dkk, 2014; Wijayanti, 2018 dan Reny, 2014). Peri-urban dicirikan menjadi 3 aspek perubahan yaitu aspek fisik (penggunaan lahan dan infrastruktur), aspek sosial dan aspek ekonomi (Reny, 2014; Budiyanitini, dkk, 2016 dan Singh, 2011).

Kota Makassar telah dijadikan sebagai salah satu pusat pemerintahan ketika di zaman Belanda, dimana pusat pemerintahannya berada di Benteng Rotterdam. Kawasan pemerintah yang awal mulanya hanya berada di sekitaran Benteng Rotterdam atau Kecamatan Ujung Pandang telah mengalami urban sprawl ke kecamatan lainnya, contohnya Kantor Gubernur yang terletak di Kecamatan Panakukkang yang dahulunya kecamatan ini adalah kawasan permukiman. Selain itu, di kecamatan ini juga telah di buat sebagai kawasan industri perbelanjaan besar pertama di Kota Makassar, pusat pendidikan (Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia) dan Rumah sakit Ibnu Sina.

Perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di kecamatan-kecamatan Kota Makassar perlu mendapat perhatian khusus dalam kebijakan perencanaan wilayah perkotaannya. Selanjutnya, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran area mana saja di Kota Makassar yang termasuk dalam PUA dan mengidentifikasi apakah ada perubahan tipologi PUA sejak tahun 2016 - tahun 2017. Sehingga dengan diketahuinya area persebaran PUA, maka pemerintah Kota Makassar dapat mengambil kebijakan dalam arahan penentuan pengembangan Kota Makassar ke depannya. Dalam penentuan PUA pada tulisan ini, maka digunakan aspek fisik (penggunaan lahan) dan sosial (kepadatan penduduk).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tipologi Peri-urban**

Kota adalah tempat yang memiliki karakteristik karena adanya pemusatan kegiatan fungsional berkaitan dengan aktivitas penduduk yang memunculkan berbagai aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan fisik (Lestari dkk, 2017). Kota bukanlah lingkungan binaan yang dibangun dalam waktu singkat, tetapi dibentuk dalam waktu yang panjang dan merupakan akumulasi setiap tahap perkembangan sebelumnya. Kota memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dari desa, yaitu memiliki fasilitas moderen dan lengkap (mall, bioskop, wahana bermain digital), kepadatan penduduk yang tinggi, secara garis besar mata pencaharian penduduknya tidak pada bidang pertanian dan terjadinya percampuran kebudayaan yang beraneka ragam (Amar, 2009). Kota dengan kepadatan penduduknya yang tinggi mengakibatkan terjadinya perkembangan kota dengan memperlihatkan perluasan wilayah dan interaksi yang terjadi antara kota inti dengan wilayah belakangnya. Sistem perkotaan besar yang saling terkait, kemudian mengalami suatu evolusi dari kota kecil, kota sedang, sampai menjadi kota besar, hingga membentuk kota metropolitan.

Dari peninjauan sejarah perkembangan dan pertumbuhan kota secara spesifik diperoleh gambaran mengenai hal-hal yang menyangkut: proses perkembangan dan pertumbuhan kota, faktor-faktor penggerak perkembangan dan pertumbuhan kota, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipakai didalam usaha pengarah dan penyusunan arah dan besarnya perkembangan dan pertumbuhan kota. Perkembangan dan pertumbuhan kota sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal, diantaranya (Hartono dkk, 2014) :

1. Keadaan geografis mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Kota yang berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul jalur transportasi, dipertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai, misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah pelabuhan laut.
2. Tapak (Site) merupakan faktor-faktor ke dua yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Salah satu yang di pertimbangkan dalam kondisi

tapak adalah topografi. Kota yang berlokasi didataran yang rata akan mudah berkembang kesemua arah, sedangkan yang berlokasi dipegunungan biasanya mempunyai kendala topografi.

3. Sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu. Contohnya seperti pembangunan bangunan di Bali yang tidak diperbolehkan melewati tinggi pohon kelapa.

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan, yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Ruang perkotaan yang besar ini akan tersebar sampai ke wilayah pedesaan. Di antara kota dan desa terdapat wilayah peralihan yang disebut dengan wilayah peri-urban. Wilayah peri-urban pertama kali diperkenalkan oleh Von Thunen dalam Nixon, dkk. (2010) pada tahun 1826 dengan nama teorinya *The Isolated State Theory*. Pada teorinya ini Von Thunen menjelaskan tentang pola pemanfaatan lahan. Dikembangkan sebelum revolusi industri Johann Heinrich von Thünen pada tahun 1826 dalam volume pertamanya yang disebut, "*The Isolated State Theory*" menekankan bahwa modelnya berpusat pada kepentingan ekonomi dalam memprediksi penggunaan lahan dan sewa lahan. Asumsi-asumsi dalam model ini termasuk pasar di pusat kota sebagai "negara terisolasi". (Nixon, dkk, 2010). Asumsi lain adalah bahwa ada hutan belantara di luar daerah yang dapat diolah, tanahnya datar dan tidak memiliki fitur lingkungan, dan kualitas tanah serta iklimnya konsisten. Dalam teorinya, para petani dalam model hanya menggunakan gerobak sapi untuk mengangkut barang ke pasar di seluruh tanah dan berperilaku rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam model tersebut, Harga Pasar dan Biaya Transportasi bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi sewa lahan dan pola

penggunaan lahan yang dihasilkan. Biaya Produksi dan Produksi juga mempengaruhi nilai tanah. (Nixon, dkk, 2010)

Wilayah peri-urban adalah wilayah yang mengalami perubahan menuju sifat kekotaan atau zona transisi antara kota dan desa yang berdimensi multifungsi (Kurnianingsih dkk, 2014; Wijayanti, 2018 dan Reny, 2014). Perkembangan wilayah peri-urban muncul sebagai zona transisi antara kota desa. Di Indonesia perkembangan wilayah peri-urban telah menyebar hampir di seluruh kota. Sebut saja perkembangan Kecamatan Kartasura yang mengarah ke sifat peri-urban akibat bentuk perkembangan dari Kota Surakarta dari tahun 2002-2012 sangat dipengaruhi oleh perkembangan urban area dan aksesibilitas karena transformasi terjadi lebih cepat di daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta (Kurnianingsih dkk, 2014). Contoh lainnya Kecamatan Lembang, Majalaya dan Jatinangor adalah kecamatan yang termasuk dalam yang terkena dampak dari sifat perkotaan, sehingga termasuk ke dalam kategori peri-urban primer (Budayantini dkk, 2016). Berdasarkan tahap perkembangannya, wilayah peri-urban terbagi atas tiga tipe jenis, yaitu (Budiyantini dkk, 2016; Rudiarto dkk, 2013 dan Singh, 2011):

1. Wilayah peri-urban primer. Wilayah ini telah hampir mendekati karakteristik dari wilayah perkotaan dengan ciri-ciri, antara lain kepadatan penduduk  $\geq 5.000$  jiwa/km<sup>2</sup>, penggunaan lahan agraris hanya  $< 29\%$  dan  $< 40\%$  penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian.
2. Wilayah peri-urban sekunder. Wilayah ini berada antara wilayah peri-urban primer dan wilayah rural-urban dengan dicirikan penggunaan lahan agraris sekitar 29-65%, kepadatan penduduk  $\geq 3.000$  jiwa/km<sup>2</sup> -  $< 5.000$  jiwa/km<sup>2</sup> dan mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian hanya sekitar 40-60%.
3. Wilayah rural-urban. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah pedesaan, sehingga masih terlihat penampakan penggunaan lahan agraris  $> 65\%$ , dan kepadatan penduduknya  $\geq 1.000$  jiwa/km<sup>2</sup> -  $< 3.000$  jiwa/km<sup>2</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah dilakukan di Kota Makassar pada 14 kecamatannya. Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 Km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Ujung Pandang

adalah inti kota dari Kota Makassar. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, yaitu luas penggunaan lahan pertanian dan kepadatan penduduk. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan analisis overlay, pembobotan, klasifikasi dan spasial. Analisis overlay digunakan untuk menggabungkan kedua data sekunder yaitu kepadatan penduduk dan luas lahan pertanian. Selanjutnya digunakan analisis pembobotan dan pengklasifikasian, yang mana pengklasifikasian dibagi menjadi 3 tipologi yaitu tipologi peri-urban primer (PUP), peri-urban sekunder (PUS) dan rural peri-urban (RPU) (Budiyantini dkk, 2016 dan Singh, 2011). Selanjutnya analisis spasial akan mengidentifikasi persebaran dari tipologi PUA di Kota Makassar sejak tahun 2006 - tahun 2017.

**Tabel 1.** Klasifikasi Tipologi PUA

Variabel	Tipologi PUA		
	PUP	PUS	RPU
Kepadatan Penduduk	≥5.000 jiwa/km <sup>2</sup>	≥3.000 jiwa/km <sup>2</sup> - <5.000 jiwa/km <sup>2</sup>	≥1.000 jiwa/km <sup>2</sup> - <3.000 jiwa/km <sup>2</sup>
Penggunaan lahan pertanian	<29%	29 - 65%	>65%

Sumber : Budiyantini dkk, 2016; Rudiarto dkk, 2013 dan Singh, 2011

**Tabel 2.** Pembobotan Tipologi PUA

Variabel	Tipologi PUA		
	PUP	PUS	RPU
Kepadatan Penduduk	3	2	1
Penggunaan lahan pertanian	3	2	1
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Sumber : Rudiarto dkk, 2013

Setelah dilakukannya pembobotan pada tabel 2 di atas, maka langkah selanjutnya ada menentukan nilai dari setiap tipologi TPU. Dengan menggunakan rumus statistik sederhana, maka diperoleh tipologi PUP memiliki nilai dari 6-5, tipologi PUS memiliki nilai 4-3 dan RUP memiliki nilai <3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengklasifikasian tipologi PUA Kota Makassar akan dilihat dari dua aspek yang berbeda, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Oleh karena itu, dengan membandingkan data sekunder dengan kriteria pada Tabel 1, maka didapatkan hasil klasifikasi sebagai berikut

### Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian

Pada aspek fisik, klasifikasi tipologi PUA akan dilakukan dengan penentuan persentase luas penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Berikut Tabel 3 persentase luas penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian.

**Tabel 3.** Persentase Luas Penggunaan Lahan

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian (%)	
		2006	2017
1	Mario	0	0
2	Mamajang	0	0
3	Tamalate	38	30,8
4	Rappocini	2,1	2,1
5	Makassar	0	0
6	Ujung Pandang	0	0
7	Wajo	0	0
8	Bontoala	0	0
9	Ujung Tanah	0	0
10	Tallo	54,5	4,2
11	Panakuk kang	0,11	1,1
12	Manggala	51,2	50,2
13	Biringkanaya	29,4	19,1
14	Tamalanrea	44,4	26

Sumber : BPS Kota Makassar, 2018a

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terdapat beberapa kecamatan yang mengalami peralihan penggunaan lahan dalam kurung waktu 11 tahun, yaitu :

1. Kecamatan Tamalate harus kehilangan lahan pertaniannya 7,2% menjadi lahan non-pertanian
2. Kecamatan Tallo harus kehilangan lahan pertaniannya 50,3% menjadi lahan non-pertanian

3. Kecamatan Panakukkang mengalami peningkatan lahan pertanian 0,99%
4. Kecamatan Manggala harus kehilangan lahan pertaniannya 1% menjadi lahan non-pertanian
5. Kecamatan Biringkanaya harus kehilangan lahan pertaniannya 10,3 % menjadi lahan non-pertanian
6. Kecamatan Tamalanrea harus kehilangan lahan pertaniannya 18,4% menjadi lahan non-pertanian

Selanjutnya, melalui klasifikasi tipologi PUA, maka diperoleh hasil berdasarkan gambar 1. menyatakan bahwa tahun 2006 terdapat 9 kecamatan (Mariso, Mamajang, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah dan Panakukkang) yang termasuk ke dalam tipologi PUP dan 5 termasuk ke tipologi PUS (Tamalate, Tallo, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea). Selanjutnya tahun 2017, terdapat 12 kecamatan yang termasuk tipologi PUP (Mariso, Mamajang, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Tamalanrea dan Biringkanaya) dan 2 termasuk ke tipologi PUS. (Tamalate dan Manggala). Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea adalah kecamatan yang mengalami peralihan tipologi seiring dengan fungsi penggunaan lahannya selama 11 tahun.

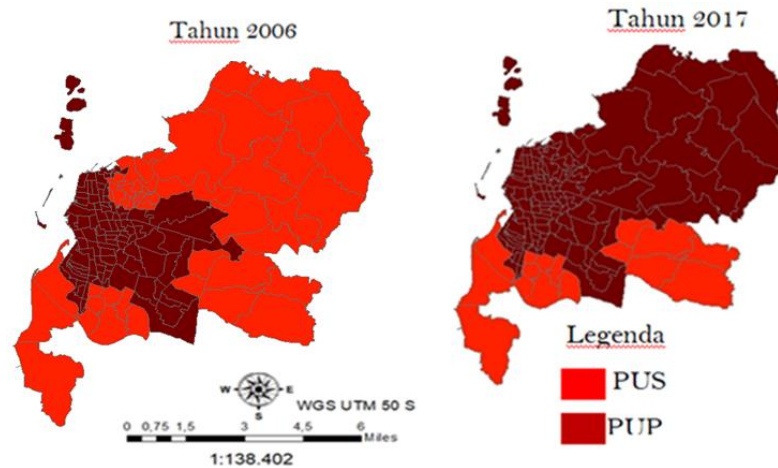
Perubahan ahli fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalanrea disebabkan pada kecamatan ini terdapat Universitas Hasanuddin dan Rumah Sakit (RS) Umum Terbesar yaitu RS.Wahidin. Suatu wilayah akan mengalami perkembangan yang pesat jika di wilayah tersebut dibangun kawasan pendidikan (Soepardi dkk, 2013 dan Ugra dkk, 2014). Universitas Hasanuddin membuat terbentuknya suatu inti kota di Kota Makassar dengan tumbuhnya pusat-pusat pendidikan lainnya seperti terdapatnya beberapa Sekolah Kesehatan Swasta, Sebuah Sekolah Ilmu Design dan lembaga kursus lainnya. Bertambahnya pusat pendidikan akan mengakibatkan bertambahnya kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga di sekitaran kawasan pendidikan ini telah tersebar banyak kos-kosan dan penjual kebutuhan sehari-hari mahasiswa.

Kecamatan Biringkanaya yang berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea terkena dampak dari sifat-sifat kekotaan Kecamatan Tamalanrea (*urban sprawl*). Hal



ini terlihat dari banyaknya kos-kosan yang tersebar di Kecamatan Biringkanaya di area Perumahan BTP sampai dengan Area Paccerakkang. Uniknya Area Paccerakkang ini juga terdapat perguruan tinggi Politeknik Kesehatan, Rumah Sakit Daya, Terminal umum antar kota/kabupaten. Kemudian di area ini juga dibangun kawasan perdagangan seperti Pasar Segar Daya dan Mall Daya dan juga perhotelan. Adanya kawasan perhotelan dikarenakan kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mandai yang merupakan tempat Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kecamatan ini juga terkenal sebagai kawasan industri pertama Kota Makassar yang disebut dengan Kawasan KIMA Makassar. Kebanyakan produksi barang-barang dibuat di kawasan ini dari industri skala menengah - atas.

Sedikit cerita berbeda dengan Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, menjadikan kecamatan ini mengalami perubahan ahli fungsi lahan dikarenakan memiliki pelabuhan utama Kota Makassar. Teori Von Thunnen menyatakan bahwa jenis penggunaan lahan dipengaruhi oleh pasar dan transportasi (Nixon, dkk, 2010). Oleh karena itu, pada kecamatan ini terdapat beberapa pabrik antara lain PT.Nestle dan PT.Global Indonesia. Barang-barang yang dimuat di pelabuhan akan dibawa ke pabrik yang lokasinya tidak jauh, sehingga biaya produksi akan murah. Selain pabrik, terdapat jejeran usaha-usaha ekspedisi barang-barang kebutuhan pokok maupun toko-toko penjualan kebutuhan pokok. Pada kecamatan ini juga terdapat perguruan tinggi, seperti Akedemi Teknisi dan Akademi Maritim. Dengan adanya kawasan perdagangan, industri dan pendidikan menjadikan kecamatan ini padat akan penduduknya dan penggunaan lahan untuk permukiman.



**Gambar 1.** Peta Tipologi PU Penggunaan Lahan Pertanian  
Sumber : Pengolahan data sendiri, 2018

### Kepadatan Penduduk

Pada aspek sosial, klasifikasi dilakukan dengan menggunakan variable kepadatan penduduk Kepadatan penduduk diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk per satuan wilayah. Berdasarkan tabel 4, selama 11 tahun terjadi peningkatan kepadatan penduduk Kota Makassar di setiap kecamatannya. Kecamatan Makassar memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya dan Kecamatan Biringkanaya yang paling terendah pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2017 Kecamatan Tamalanrea memiliki jumlah penduduk paling sedikit dan Kecamatan Biringkanaya berada pada urutan kedua terendah.

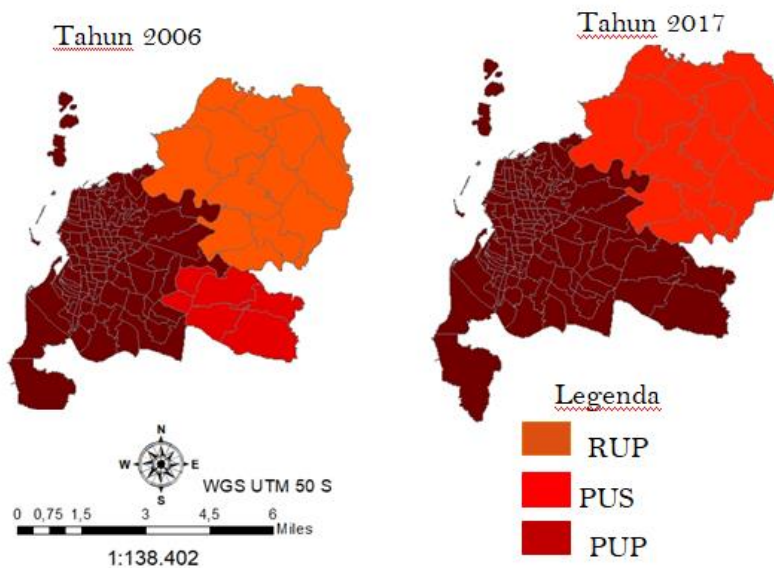
**Tabel 4.** Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	
		2006	2017
1	Mario	29.293	32.814
2	Mamajang	26.208	27.194
3	Tamalate	8.137	9.808
4	Rappocini	15.113	18.037
5	Makassar	32.093	33.751
6	Ujung Pandang	10.624	10.911
7	Wajo	17.175	15.639
8	Bontoala	28.703	27.040
9	Ujung Tanah	7.957	11.256
10	Tallo	15.104	23.949

11	Panakuk kang	10.071	8.709
12	Manggala	4.003	5.893
13	Biringkanaya	2.605	4.323
14	Tamalanrea	2.732	3.563

Sumber : BPS Kota Makassar, 2018a

Selanjutnya, melalui klasifikasi tipologi PUA, maka diperoleh hasil berdasarkan gambar.2 menyatakan bahwa kepadatan penduduk pada tahun 2006 terdapat 11 kecamatan termasuk ke dalam tipologi PUP (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo dan Panakuk kang), 1 kecamatan tipologi PUS (Kecamatan Manggala) dan 2 kecamatan RPU (Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea).

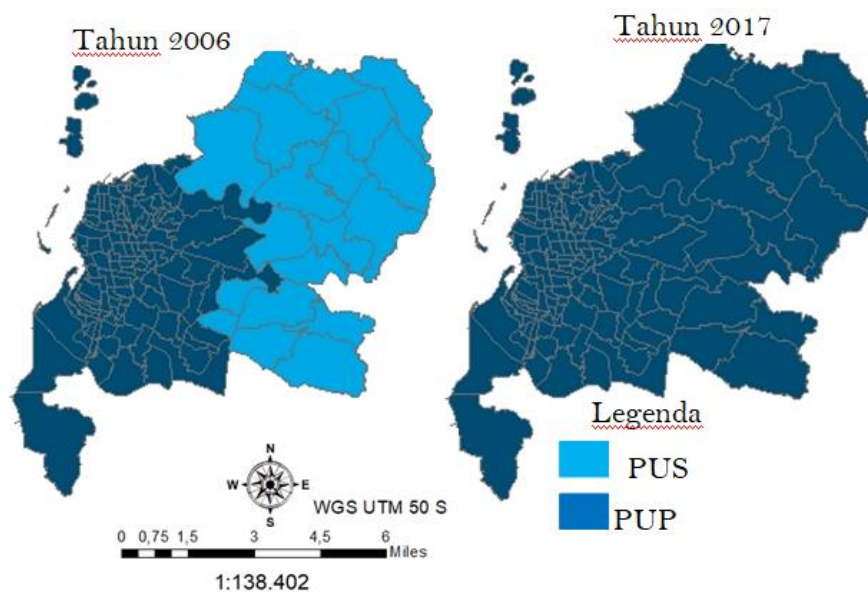


**Gambar 2.** Peta Tipologi PU Kepadatan Penduduk  
Sumber : Pengolahan data sendiri, 2018

Pada tahun 2017, terdapat 12 kecamatan ke dalam tipologi PUP (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Manggala dan Panakuk kang) dan 2 kecamatan topologi PUS (Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea). Kecamatan Manggala adalah kecamatan yang mengalami perubahan tipologi dari PUS menjadi PUP. Kemudian Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea berubah dari tipologi RUP menjadi PUS.

## Tipologi Fisik dan Sosial

Pengklasifikasian tipologi PUA di Kota Makassar dilakukan dengan menggunakan metode overlay dan pembobotan (Tabel 2.), sehingga diperoleh pengklasifikasian tipologi PUA di Kota Makassar. Berdasarkan gambar.3 tergambarakan jika pada tahun 2006 terdapat 11 kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo dan Panakukkang) yang termasuk ke dalam tipologi PUP dan 3 kecamatan tipologi PUS (Kecamatan Biringkanaya, Manggala dan Tamalanrea), sedangkan pada tahun 2017 semua kecamatan termasuk ke dalam tipologi PUP. Selama rentang 11 tahun telah terjadi perubahan tipologi di beberapa kecamatan yang awalnya tipologi PUS menjadi PUP yaitu pada Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea.



**Gambar 3.** Peta Tipologi PU Aspek Fisik Sosial  
Sumber : Pengolahan data sendiri, 2018

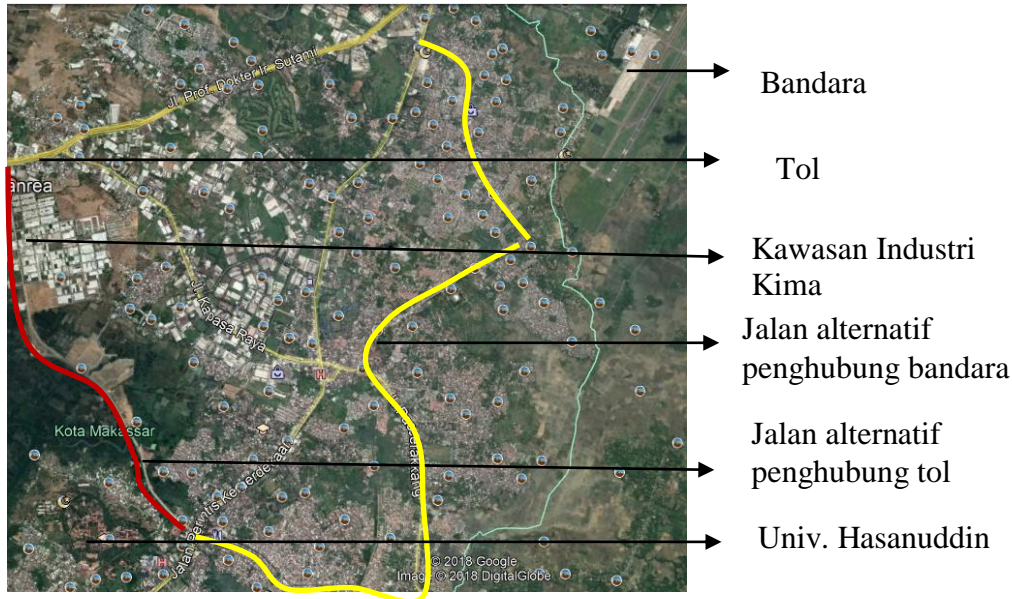
Pada tahun 2000, Kecamatan Manggala dijadikan oleh masyarakat Kota Makassar sebagai pusat permukiman mereka, dimana inti kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan tidak dapat lagi menampung kawasan permukiman seperti di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar. Akhirnya terjadinya urban sprawl ke kecamatan yang ada di

sekitarnya, salah satunya Kecamatan Manggala. Kecamatan Manggala yang merupakan kawasan permukiman bagi masyarakat Kota Makassar memicu tumbuhnya toko-toko kecil (sektor perdagangan), dimana toko-toko ini menjual segala kebutuhan pokok bagi masyarakat permukiman. Tercatat pada tahun 2011 jumlah toko hanya 11 dengan jenis mini market, pasar umum dan pertokoan (BPS, 2011). Kemudian tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebanyak lebih dari 1.201 dengan jenis pertokoan, rumah makan, mini market dan pasar umum (BPS, 2018). Selain itu terdapat juga sektor-sektor lainnya seperti Hotel Maxone, Bugis Waterpark, jasa pegadaian, dan bank.

Kecamatan Manggala adalah wilayah bagi cikal bakal suatu inti kota baru. Hal ini sesuai dengan teori Harris-Ullman, 1945 mengenai struktur ruang berganda bahwasanya suatu kawasan permukiman adalah cikal bakal dari suatu pusat kota baru, dimana akan tumbuh sektor perdagangan yang disusul dengan sektor lainnya. Tidak berbeda jauh dengan Kecamatan Manggala yang dahulunya digunakan sebagai kawasan permukiman, Kecamatan Biringkanaya adalah kecamatan yang dahulunya merupakan bagian kota terluar dari Kota Makassar. Kecamatan Biringkanaya mulai mengalami kepadatan penduduk yang pesat, sejak adanya Bandara Sultan Hasanuddin dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tamalanrea. Dengan adanya Bandara Sultan Hasanuddin ini, para pengusaha tertarik untuk membangun suatu usaha disekitaran Bandara yang akhirnya tersebar sampai ke Kecamatan Biringkanaya, seperti Daya Grand Square, Pasar Baru, Hotel Harper dan Dalton. Selain itu, di Kecamatan ini dahulunya telah ada RS Umum daya dan terminal bus antar luar daerah, dimana keduanya direnovasi ulang oleh pemerintah. Kini RS Umum Daya menjadi daya tarik bagi masyarakat di sekitarnya ataupun yang dari luas Kota Makassar untuk berobat dibandingkan harus ke RS Umum Wahidin yang memiliki jumlah pasien yang sangat banyak.

Selanjutnya Kecamatan Tamalanrea, sejak tahun 2018 telah dibuatkan beberapa jalan alternatif (tidak lagi jln.perintis kemerdekaan) contohnya jalan yang terhubung langsung dengan Tol dan Kawasan Kima Industri. Di poros jalan baru ini telah dibangun kawasan permukiman elit yaitu Citraland yang tidak lama lagi akan menyusul kawasan permukiman lainnya. Selain jalan alternatif yang telah disebutkan,

jalan alternatif keduanya adalah Jalan Tamalanrea Raya (Perumahan BTP) yang berhubungan langsung dengan Jalan Paccerakang Belakang hingga tembus ke Bandara.



**Gambar 4.** Jalan Alternatif di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya  
Sumber : *Google Earth*

### Masyarakat Leluhur Kota Makassar

Masyarakat leluhur Kota Makassar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang telah tinggal sangat lama di Kota Makassar dan masih hidup sampai tahun 2018. Jika ditanyakan pada para masyarakat leluhur kota terkait kondisi lalu lintas tahun 1970 - 2000 di Kota Makassar, mereka akan menjawab secara bersamaan tidak ada kemacetan, angkutan umum pete-pete masih sangat jarang dan masih ada angkutan bendi di Kecamatan Biringkanaya. Penulis pertama yang merupakan salah seorang dari masyarakat leluhur yang tinggal selama 27 tahun di Kota Makassar masih mengingat ketika dia berusia 4-5 tahun (tahun 1995-1996), dia sering menaikki bendi untuk dapat sampai ke kantor mamanya dan kendaraan umum pete-pete masih langka sehingga terkadang dia dan ibunya harus menunggu beberapa menit.

Pada tahun 1970 - 2000, para penumpang pete-pete hanya memerlukan waktu 15 - 20 menit untuk sampai di Kecamatan Biringkanaya dari Kecamatan Panakukkang (14km). Pada tahun 2017 - 2018, para penumpang akan memerlukan waktu 45 menit

- 1 jam dikarenakan terjadinya kemacetan di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan akibat jumlah kendaraan yang bertambah tiap tahunnya. Tercatat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 87.009 (tahun 2015-2016) disertai laju pertumbuhan jalan yang kecil dibandingkan laju pertumbuhan kendaraan (Sri, 2017). Selain permasalahan kemacetan, kepadatan bangunan dan tingginya bangunan di Kota Makassar menyebabkan beberapa rumah/bangunan masyarakat leluhur tidak mendapatkan intensitas penyinaran matahari yang cukup, sehingga rumah akan lembab dan penggunaan energi listrik yang berlebihan (yang hanya berlantai satu atau berlantai lebih dari 1 tetapi bangunan disekelilingnya masih memiliki ketinggian lebih tinggi). Contoh kasusnya adalah kawasan permukiman di Kecamatan Panakukkang, khususnya di Jalan Sukaria (rumah orang tua penulis pertama). walaupun kategori permukiman, tapi telah terdapat beberapa rumah di sekitarnya telah bertingkat 2-4 yang dijadikan sebagai kos-kosan (kamar sewa) (lokasi dekat dari Universitas Bosowa dan Muslim Indonesia) maupun usaha cuci pakaian dan sebagainya.

Pemerintah yang bertindak sebagai pengambil keputusan akan penataan ruang di Kota Makassar hendaknya membuat suatu kebijakan yang terintegrasi dengan masyarakat leluhur Kota Makassar. Perubahan struktur Kota Makassar ke arah *smart city* bukan berarti Kota Makassar harus kehilangan jati dirinya sebagai Kota Makassar. Keadilan bukan hanya terkait pembentukan perundang-undangan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat leluhur Kota Makassar, akan tetapi yang lebih penting bagaimana untuk menghindari terjadinya permasalahan tersebut. Salah satu contohnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Bali untuk melarang pembangunan bangunan yang melebihi pohon kelapa yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Bali secara tidak langsung telah menciptakan keasrian di Bali. Pemerintah Jakarta yang telah melarang beberapa angkutan umum dan kendaraan untuk memasuki area kemacetan, sehingga berkurangnya kemacetan. Jika bukan pemerintah Kota Makassar yang memperhatikan keberlangsungan hidup di Kota Makassar, siapa lagi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan aspek fisik dan sosial di Kota Makassar, pada tahun 2006 terdapat 11 kecamatan yang termasuk ke dalam tipologi PUP dan 3 kecamatan tipologi PUS, sedangkan pada tahun 2017 semua kecamatan termasuk ke dalam tipologi PUP. Selama rentang 11 tahun telah terjadi perubahan tipologi di beberapa kecamatan yang awalnya tipologi PUS menjadi PUP yaitu pada Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Pengklasifikasian tipologi PU mampu menjelaskan jangkauan pengaruh aktivitas kekotaan dari Kecamatan Ujung Pandang dan Makassar sampai ke wilayah terluar Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Manggala.

Di samping itu juga, persebaran sifat kekotaan telah memberikan dampak nyata yang terlihat bagi masyarakat leluhur Kota Makassar, antara lain bangunan-bangunan yang tinggi sehingga menghalangi sinar matahari yang masuk bagi rumah-rumah para masyarakat leluhur dan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan yang menyebabkan kemacetan. Dampak yang nyata ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Makassar untuk menata Kota Makassar bagi para penduduk tersebut, sehingga mereka masih merasakan adanya originalitas dari Kota Makassar sejak dahulu sampai generasi yang akan datang. Oleh karenanya itu, Pemerintah Kota Makassar perlu mengambil langkah kebijakan terkait dampak perubahan tipologi peri-urban bagi Kota Makassar, khususnya dalam perencanaan tata ruang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amar. (2009). Identitas Kota, Fenomena Dan Permasalahannya. *Ruang*, 1(1), 55–59.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2007). Makassar Dalam Angka Tahun 2007. UD.Areso : Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2011). Kecamatan Manggala Dalam Angka Tahun 2011. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2018a). Makassar Dalam Angka Tahun 2018. UD.Areso : Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2018b). Kecamatan Manggala Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Kota Makassar.



- Budiyantini, Y., & Pratiwi, V. (2016). Peri-urban typology of Bandung Metropolitan Area. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 833–837. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.152>
- Hartono, Y., & Utomo, D. P. (2014). No Title, 04(02), 74–96.
- Kurnianingsih, N. A., & Rudiarto, I. (2014). Analisis Transformasi Wilayah Peri-Urban pada Aspek Fisik dan Sosial Ekonomi ( Kecamatan Kartasura ), 10(September), 265–277.
- Lestari, R. A., Fatimah, E., & Barus, L. S. (2017). Identifikasi Perkembangan Perkotaan Metropolitan Cirebon Raya. *Seminar Nasional Cendekiawan 3 (Buku 2)*, 199–205. [https://doi.org/ISSN \(P\) : 2460 - 8696](https://doi.org/ISSN(P):2460-8696)
- Nixon, J., Pottage S., Cannell A., Barros J. (2010) “The Isolated State”: an ABM approach to the Von Thünen Model. Proceeding, University College London. (Unpublished)
- Reny Yesiana (2014). Typologies of Peri-Urban Klaten-Central Java:Based on Socio-Economic Perspective. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 1(1), 57-64
- Rudiarto, I., Handayani, W., & Pigawati, B. (2013). Zona Peri-Urban Semarang Metropolitan : Perkembangan, 116–128.
- Singh, P.B. (2011). Changing Rural Landscapes in The Peri-Urban Zone of Varanasi and Strategies for Sustainable Planning dalam International Symposium: Sustainable Rural Landscape and Planning in Asia Pasific Region. Prosiding International Symposium –Sustainable Rural Landscape and Planning in Asia Pacific Region. IFLA APR Cultural Landscape Committee dan Korean Society of Rural Planning. December 5th – 8th 2011. Seoul - Korea Selatan.
- Soepardi Harris dan Atie Ernawati (2013). Pengaruh Keberadaan Kampus Universitas Indraprasta PGRI Terhadap Perkembangan Wilayah Kecamatan Jagakarsa. *Jurnal Faktor Exacta*, 6 (1), 51-69
- Sri, Hidayat. (2017). Pertimbangan Isu Transportasi Dalam Perencanaan Ruang Kota Makassar. Artikel Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. (<https://dplh.sulselprov.go.id/index.php/art>)
- Ugra. H.S dan Santy. P.D (2014). Pengaruh Kawasan Pendidikan Terhadap Perkembangan Aktivitas Perdagangan dan Jasa di Koridor Jalan Banjarsari Selatan-Mulawarman Raya. *Jurnal Ruang*, 2(1), 311-320
- Wijayanti, Ramadhian. (2018.) Analisis Transformasi Spasial Sosial Ekonomi dan Kekompakan Kota di Wilayah Peri-urban Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta.

